

STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM SATU PARTAI DENGAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA (Studi Kasus Irwan Hayat dari Partai PKB di DAPIL III Kabupaten Sumenep)

Oleh

Dwi Listia Rika Tini¹, Nur Inna Alfiyah^{2**}

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep

Email: rikatini@wiraraja.ac.id, nurinna@wiraraja.ac.id**

Abstract

The 2019 general election with an open proportional system has caused intense competition between candidates in one of their electoral districts. To win the election, legislative candidates compete with each other in one party or with candidates from other parties. This competition resulted in the candidates competing with each other in terms of strategies, tactics and winning methods. So this makes a new phenomenon that occurred during the 2019 legislative elections yesterday where competition between candidates for one party is interesting to study. As was the case with Irwan Hayat, a candidate from the PKB Dapil III party, the Sumenep DPRD. Therefore, the purpose of this research is to find out how the competition between candidates from the PKB Dapil III party in Sumenep Regency is. As well as what strategy is carried out by Irwan Hayat in an effort to win in the 2019 legislative elections and what is the role and position of the party in this competition. This research method uses qualitative methods with a case study approach. The data source in this study uses primary data obtained from direct interviews with Irwan Hayat, a member of the DPRD Kab. Sumenep and the Chairperson of the Sumenep Regency PKB DPC KH. Imam Hasyim and participatory observation. The results of the study show that the strategy carried out by Irwan Hayat, first, is a social capital strategy, namely a person or figure known to constituents. Second, prioritizing approaches to local community leaders and party officials starting at the RT, RW, sub-district levels and other community leaders. Third, Utilizing the mass support base of PKB in the electoral area III, Irwan Hayat even entered the ranks of party officials at the Sumenep Regency DPC level. Fourth, the populist strategy, namely work programs that are more pro-people.

Keywords: Political Strategy, Open Proportional System, DPRD, PKB

Abstrak

Pemilihan umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan pemilu, para caleg saling bersaing satu sama lain dalam satu partai atau dengan caleg partai lain. Persaingan ini mengakibatkan para caleg saling beradu strategi, taktik dan metode kemenangan. Sehingga hal ini menjadikan fenomena baru yang terjadi selama pemilu legislatif 2019 kemarin dimana persaingan antar caleg satu partai menarik untuk dikaji Seperti halnya yang dilakukan oleh Irwan Hayat caleg dari partai PKB Dapil III DPRD Sumenep. Maka dari itu, tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana persaingan antar caleg dari partai PKB Dapil III Kabupaten sumenep. Serta Strategi apa yang dilakukan oleh Irwan Hayat dalam upaya kemenangan dalam pemilu legislatif 2019 serta bagaimana peran dan posisi partai dalam persaingan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Irwan Hayat anggota DPRD Kab. Sumenep serta Ketua DPC PKB Kabupaten Sumenep KH. Imam Hasyim dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Irwan Hayat, *pertama*, strategi

sosial kapital yaitu *person* atau figur dikenal oleh konstituen. *Kedua*, Mengedepankan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat maupun pengurus partai dari mulai tingkat RT, RW, Kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. *Ketiga*, Memanfaatkan basis dukungan massa PKB di wilayah dapil III bahkan Irwan hayat masuk jajaran pengurus partai tingkat DPC Kabupaten Sumenep. *Keempat*, strategi populis yaitu program kerja yang lebih pro rakyat.

Kata Kunci : Strategi Politik, Sistem Proporsional Terbuka, DPRD, PKB

1. PENDAHULUAN

Pemilu sangat penting untuk menentukan pilihan rakyat memilih pemimpinnya. Undang-undang telah menjelaskan tentang fungsi pemilu yakni pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan hukum, pemilu harus dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Pemilu diselenggarakan dan diikuti oleh partai-partai politik yang telah terverifikasi oleh KPU.

Sistem pemilu merupakan bentuk hasil dari sistem demokrasi di Indonesia. Partai-partai peserta pemilu merupakan tonggak penting dalam sistem demokrasi negara ini. Hasil internalisasi partai menjadi cermin gambaran sistem ekonomi dan politik negara ini. Pemilu pada tahun 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019 dengan bersamaan pemilihan presiden.

Penyelenggaraan pemilu 2019 kemarin diikuti 14 partai politik termasuk partai lokal di Nanggro Aceh Darussalam. Pemilu tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan pemilu 2014, haya saja

menggunakan sistem pemilihan metode *sainte-lague*.

Pemilihan umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan pemilu, para caleg saling bersaing satu sama lain dalam satu partai atau dengan caleg partai lain. Persaingan ini mengakibatkan para caleg saling beradu strategi, taktik dan metode pemenangan. Strategi dan taktik ini juga di dukung dengan ongkos biaya politik yang besar untuk menunjangnya. Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Tanpa strategi, kekuasaan yang merupakan tujuan utama berpolitik tidak akan pernah terwujud. Selain itu untuk memenangkan pertarungan pemilu khususnya DPR dan DPRD perlu adanya konsolidasi sebagai tahapan dari strategi.

Informasi mengenai persaingan antar caleg dalam satu partai justru dituturkan dari caleg itu sendiri dan juga pengurus partai. Sehingga hal ini menjadikan fenomena baru yang terjadi selama pemilu legislatif 2019 kemarin

dimana persaingan antar caleg satu partai menarik untuk dikaji. Untuk itu dalam penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana persaingan antar caleg dari partai PKB di DPRD Sumenep, Dapil III Kabupaten sumenep. Strategi apa yang dilakukan dalam upaya pemenangan caleg dalam pemilu legislatif 2019 serta bagaimana peran dan posisi partai dalam persaingan tersebut.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1.1. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dua kali melontarkan gagasan segar dengan mengusulkan penghapusan sistem nomor urut calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2009. Gagasan Presiden SBY ini menunjukkan sikap serius Presiden terhadap soal yang sangat memengaruhi wajah parlemen Indonesia kedepannya. RUU di bidang politik diajukan oleh pemerintah dan dibahas di DPR. Benar saja, sebagaimana diketahui sekarang, bahwa Indonesia akhirnya memilih menggunakan sistem Pemilu proporsional. Dalam dua UU Pemilu terakhir yaitu UU No. 12 tahun 2003 dan UU No. 10 Tahun 2008, sepakat dipilih sistem proporsional terbuka yakni sebuah sistem dimana penetapan calegnya berdasarkan mekanisme suara terbanyak. Maknanya

adalah bahwa pemilih diberikan pilihan yang langsung kepada calon wakil mereka untuk duduk di DPR atau DPRD. Sistem ini digunakan sejak Pemilu 2009, setelah sebelumnya pasal yang mengatur sistem proporsional tertutup berdasarkan nomor urut dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 melalui *judicial review* dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Khusus terhadap sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, maka upaya meningkatkan derajat keterwakilan semakin menemukan bentuknya. Para wakil rakyat semakin memiliki hubungan yang erat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas para wakil semakin nyata. Akibat yang muncul, para rakyat yang diwakili dapat menuntut kepada para wakilnya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika hal itu tidak terpenuhi, para wakil akan memperoleh hukuman pada Pemilu berikutnya untuk tidak dipilih kembali. Upaya menciptakan sistem Pemilu yang menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan memiliki derajat keterwakilan yang tinggi adalah sebuah keniscayaan bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagai sebuah negara demokratis.

Dari sini pula muncul kader-kader instan berlimpah uang dan popularitas yang ikut bertarung mengharap simpati rakyat. Potensi pelanggaran

beriklan, *money politic*, dan cara-cara berpolitik dan berkampanye yang kurang mendidik diprediksi akan banyak mewarnai pesta Pemilu. Tampaknya berkah demokrasi sebagai penerapan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak tidak signifikan berkontribusi menghasilkan anggota parlemen berkualitas. Namun, sistem yang sedang digagas ini bisa disebut sebagai bentuk respons atas kekecewaan banyak kalangan, yang dalam Pemilu 2004 mendapat suara terbanyak ternyata tidak bisa duduk di legislatif.

Dalam sistem proporsional terbuka mendorong para kandidat yang maju menjadi caleg harus bekerja lebih keras untuk memperebutkan kursi dewan. Dengan sistem ini caleg, yang populis dan banyak uang sekalipun belum tentu bisa terpilih. Sistem proporsional terbuka juga dianggap dapat membuat internal partai tak solid karena para caleg intrapartai juga saling berkompetisi ketat satu sama lain. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang mensyaratkan akumulasi suara partai dalam satu daerah pemilihan, lalu dibagi angka minimal untuk satu kursi, lalu akumulasi kursi yang diperoleh lalu akan dibagi berdasar nomor urut caleg yang ditentukan parpol. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, setiap caleg dengan suara terbanyak dan memenuhi syarat mendapatkan satu kursi, akan

otomatis terpilih walau berada di nomor urut berapapun.

Ada banyak manfaat yang bisa diambil dari gagasan menerapkan sistem pemilu legislatif dengan menggunakan model proporsional terbuka (Jamaluddin, 2022). *Pertama*, mendekatkan wakil rakyat dengan konstituen. Dengan sistem ini, diharapkan mendapatkan wakil rakyat yang sesuai pilihan hati nurani rakyat. Kita melihat komunikasi antara anggota legislatif dan rakyat di tingkat bawah masih sering terjadi kesenjangan karena mereka tidak memiliki kedekatan hubungan personal.

Kedua, kader akar rumput atau tokoh populer akan memiliki peluang terpilih. Kader akar rumput terbentuk karena dia banyak turun dan dikenal konstituennya. Karena dia banyak turun, dia akan lebih optimal menjalankan fungsi agregasi kepentingan masyarakat dan representasi politik masyarakat. Kebalikan dari kader akar rumput adalah kader 'jenggot'. Seperti namanya, kader jenggot adalah kader yang mengakar ke atas. Kader semacam ini mengandalkan eksistensinya dari kedekatan dengan jajaran pimpinan partai semata.

Ketiga, model baru ini bisa menghindarkan dari praktik KKN di internal partai, di mana tradisi yang kita lihat, hanya orang yang ada di lingkaran kekuasaan partai, atau yang memiliki

hubungan dekat dengan elite partai yang bisa mendapatkan nomor urut teratas dalam pencalonan legislatif. Keempat, menghindari terjadinya oligarki dalam partai politik.

Kelemahan sistem ini adalah timbulnya citra buruk bagi perkembangan partai, karena seperti yang terlihat sekarang, banyak anggota legislatif yang duduk di DPR/DPD atas penunjukan elite partai, bukan atas kemauan konstituennya. Faktor ini pula yang menyebabkan ketidakpuasan kader partai sehingga memunculkan resistensi yang tinggi. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru, kader yang tidak puas dengan partainya mendirikan partai baru.

Kelemahan lain adalah orang-orang yang populer seperti selebritis memiliki peluang besar untuk dipilih rakyat meski tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas. Namun, masalah ini bisa diatasi selama kader populer ini diberi ruang gerak yang lebih luas untuk meningkatkan intelektual dan wawasannya di bidang yang digeluti. Disamping itu, untuk memperkuat kapabilitas anggota parlemen, mereka bisa disediakan tim ahli untuk setiap anggota.

Tantangan-tantangan dalam Sistem Proporsional Terbuka yakni :

1. Kompetisi *interparty* dan *intraparty* lebih tajam, biaya kampanye tinggi, ongkos politik

mahal, *money politics*, dan *black campaign*.

2. Kompetisi makin individual, liberalisasi persaingan, konflik horisontal.
3. Partai politik kurang berperan, deparpolisasi, era konsultan politik.
4. Kurang bersahabat dengan perempuan, kandidat minoritas, kelompok marginal, dan kandidat miskin *political capital*, aristokratisasi politik.
5. Mendorong pragmatisme politik, uang mengalahkan ideologi, materialisme politik.

Terlalu banyak pilihan, terlalu sedikit informasi dan interaksi, jalan pintas tradisional, transaksional, atau abstain

2.2. Strategi Politik

Strategi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh tim kampanye yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan dalam pilkada. Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh kandidat dan tim kampanye dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada kandidat tersebut. Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas pada tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting

adalah bagaimana kandidat dan tim kampanye tersebut mengimplementasikannya di lapangan.

Kampanye berusaha untuk mendorong para pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon. Untuk meraih sebanyak mungkin pemilih, menurut Peter Schroder kandidat perlu melakukan smart campaign atau setidaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Schroder, 2010) :

1. Model kampanye terbaik adalah sepanjang usia. Asumsinya adalah menjadi orang baik, sehingga orang tersebut akan dipercaya ketika membutuhkan dukungan.
2. Kampanye terbaik adalah mengemukakan citra sosial dan figur diri di depan publik. Dengan demikian publik akan mengerti karakter orang tersebut dan jika perlu sampai sedetil-detilnya
3. Praktik kampanye terbaik adalah jika melalui inducement atau bujukan yang dapat ditempuh dengan menyampaikan gagasan dari orang ke orang atau dari rumah ke rumah. Cara ini harus diimbangi dengan penguatan strategi serta rasionalisasi.

Dalam merumuskan strategi, Sun Tzu menjelaskan bahwa dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan, selanjutnya ia berpendapat bentuk yang lain dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, kemudian yang terbaik berikutnya adalah

menghancurkan aliansi lawan, berikutnya adalah menyerang tentara lawan, sedangkan yang paling buruk adalah menduduki kota-kota yang dibentengi lawan (Schroder, 2010). Untuk dapat menyerang lawan, maka strategi lawan tersebut harus dapat dikenali terlebih dahulu. Oleh karena itu pengenalan atas pihak lawan sangatlah penting. Jika tidak, kita tidak akan dapat mengenali lawan.

Penyerangan strategi lawan berarti secara terus menerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan, sehingga lawan tidak bisa merealisasikan strateginya. Dalam sepak bola hal ini dikenal dengan istilah gangguan dini yang menyebabkan pola permainan tidak dapat dibangun. Yang termasuk strategi ofensif adalah strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Pada dasarnya, semua strategi ofensif yang diteapkan saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara kita dan partai-partai pesaing yang ingin kita ambil alih pemilihnya. Di dalam strategi ofensif yang digunakan untuk mengimplementasikan politik yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-leuntungan yang dapat diharapkan daripadanya.

Strategi defensif menurut Peter Schroder akan muncul ke permukaan, misalnya apabila partai pemerintah atau

koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau apabila pangsa pasar ingin dipertahankan. Selain itu strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak keuntungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut Moleong (Moleong, 2011) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati oleh peneliti. Sedangkan Menurut Tohirin penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit (Tohirin, 2011). Prof. Dr. Sugiyono menjelaskan pengertian metode penelitian kualitatif sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Selain itu, Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati mengatakan, metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus (R Indrawan, 2016). Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kasus karena sesuai dengan masalah yang dilihat, dan peneliti akan mendeskripsikan bagaimana persaingan antar caleg dari partai PKB di DPRD Sumenep, Dapil III Kabupaten sumenep. Strategi apa yang dilakukan dalam upaya pemenangan caleg dalam pemilu legislatif 2019 serta bagaimana peran dan posisi partai dalam persaingan tersebut

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Dapil III dan Tingkat Persaingan Antar Caleg

Sistem pemilu di Indonesia yang menganut sistem pemilu proporsional terbuka, persaingan antar calon legislatif anggota DPRD semakin ketat. Tidak hanya terjadi antar individu dalam suatu partai dengan individu dari partai lain, melainkan persaingan antar individu sesama partai juga sangat ketat. Penentuan caleg yang lolos dalam satu partai bukan

lagi ditentukan oleh nomor urut caleg, dimana sistem proporsional tertutup sebelumnya ditentukan oleh nomor urut topi dan sepatu, semakin awal nomor urut maka semakin besar peluang lolos sebagai caleg. Sedangkan di sistem proporsional terbuka saat ini, yang menentukan adalah suara terbanyak yang diraih oleh caleg tersebut.

Dalam penelitian yang akan kami lakukan, kami akan meneliti tentang

persaingan antar caleg dari partai PKB di DPRD Sumenep, Dapil III Kabupaten Sumenep

Pada pemilihan umum legislative periode 2019-2024 Kabupaten Sumenep, PKB menjadi pemenang dengan memperoleh kursi terbanyak yakni 10 kursi, Salah satu caleg dari PKB yang kita wawancarai adalah Irwan Hayat (Madura, 2019). Berikut ini adalah hasil perhitungan suara pada Dapil III

Rekapitulasi Suara pada Dapil III DPRD Kab. Sumenep

| | Data Suara Sah dan Tidak Sah | Guluk-Guluk | Ganding | Pragaan |
|----|--|-------------|---------|---------|
| 1. | Jumlah seluruh Suara Sah | 34.904 | 23.808 | 46.967 |
| 2. | Jumlah Suara Tidak Sah | 1.197 | 1.477 | 1.578 |
| 3. | Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah | 36.101 | 25.288 | 48.533 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Sumenep, data diolah

Perolehan Seluruh Partai pada Dapil III DPRD Kab. Sumenep

| | Nama Partai | Guluk-Guluk | Ganding | Pragaan |
|----|-------------------------------|-------------|---------|---------|
| 1. | Partai Berkarya | 62 | 73 | 247 |
| 2. | Partai Keadilan Sejahtera | 56 | 79 | 92 |
| 3. | Partai Kebangkitan Bangsa | 221 | 510 | 663 |
| 4. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 306 | 388 | 317 |
| 5. | PDIP | 21 | 335 | 778 |
| 6. | Partai Golongan Karya | 25 | 79 | 49 |
| 7. | Partai Nasdem | 82 | 113 | 36 |

| | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|
| 8. | Partai Gerakan perubahan Indonesia | 2 | 25 | 12 |
| 9. | PPI | 5 | 7 | 9 |
| 10. | PPP | 77 | 149 | 314 |
| 11. | PAN | 419 | 233 | 123 |
| 12. | Partai Hati Nurani Rakyat | 35 | 53 | 367 |
| 13. | Partai Demokrat | 102 | 543 | 365 |
| 14. | Partai Bulan Bintang | 16 | 18 | 18 |
| 15. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 14 | 13 | 9 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumenep, data diolah

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat perolehan suara terbanyak Partai pada Dapil III adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah sebanyak 1.334, mengikat 3 daerah tersebut basis kuasa pesantrean. Maka dari itu banyak

calon anggota DPRD yang berbondong-bondong berangkat dari partai PKB, sehingga Dapil III memiliki 7 calon anggota DPRD. Berikut nama-nama calon anggota DPRD Dapil III dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dari PKB

| | Nama Calon | Gul uk-Gul uk | Gandin g | Praga an | Jumlah akhir |
|---|-----------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| 1 | Muhammad Hasan Abdul Hamid | 228 | 248 | 319 | 795 |
| 2 | h. Abrori, S.Ag, MM | 279 | 216 | 4.995 | 5.490 |
| 3 | Fifi Sofiyati Afifah, S.Pdi | 63 | 90 | 2.593 | 2.746 |
| 4 | Ahmad Naufil MS | 399 | 4.810 | 708 | 5.917 |
| 5 | Tin Mayyah | 84 | 239 | 60 | 383 |
| 6 | Maimunah | 14 | 19 | 4 | 37 |
| 7 | Irwan Hayat, S.HI | 5.275 | 930 | 342 | 6.547 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumenep, data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa suara terbanyak jatuh pada nomer urut 7 yaitu Irwan Hayat dengan perolehan suara 6.547 suara se Dapil III. Dari hal tersebut menandakan bahwasanya saat ini dengan sistem pemilu proporsional terbuka masyarakat melihat figur yang dipilih bukan berdasarkan nomer urut pada partai. Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana strategi irwan hayat dalam memperoleh kemenangan dalam satu partai dengan sistem pemilu proporsional terbuka.

Irwan Hayat mulai aktif menjadi anggota parpol PKB sejak mulai tahun 2007, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep. Sejak muda beliau sudah aktif diberbagai organisasi, sehingga pada tahun 2019 mencalonkan dirinya menjadi Caleg DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD, bahkan saat ini beliau dipercaya menakhodai Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa periode 2021-2026.

Strategi Pemenangan Caleg dan Posisi serta Peran Pengurus Partai

Irwan Hayat mulai aktif menjadi anggota parpol PKB sejak mulai tahun 2007, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep. Sejak muda beliau sudah aktif diberbagai organisasi, sehingga pada tahun 2019

mencalonkan dirinya menjadi Caleg DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD, bahkan saat ini beliau dipercaya menakhodai Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa periode 2021-2026 (Faishal, 2021).

Irwan Hayat bisa dibilang memiliki strategi yang bagus dalam mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Sebelum terpilih menjadi anggota DPRD periode 2019-2024, dia sudah pernah mencalonkan dirinya pada periode 2014-2019 namun tidak terpilih karena menyadari namanya belum banyak dikenal orang. Hal itu bukanlah sebuah kegagalan namun merupakan salah satu bentuk dari strategi irwan untuk menghadapi pemilu pada tahun 2019. Pada pemilu tahun 2014 dia hanya ingin memunculkan namanya terlebih dahulu untuk mendongkrak popularitasnya agar pada pemilu 2019 nama dia sudah mulai banyak dikenal. Benar saja, strateginya memang jitu. Pada pemilu tahun 2019, dia salah satu yang terpilih menjadi anggota DPRD dari partai PKB.

Dalam upayanya mendongkrak suara dalam pemilu tahun 2019, Irwan Hayat tidak hanya mengandalkan posisinya sebagai Sekretaris PKB. Dia mempunyai beberapa strategi politik yang dicanangkan pada saat kampanye, antara lain :

1. Mengedepankan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat maupun pengurus partai dari mulai tingkat RT, RW, Kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
2. Memanfaatkan basis dukungan massa PDIP di wilayah dapil khususnya di Ganding, guluk-guluk dan paragaan sebagai basis kuat tradisional PKB.
3. Memanfaatkan pemuda dan mahasiswa sebagai agen marketingnya karena beliau aktif di organisasi PMII
4. Mengedepankan prestasi dirinya sebagai caleg *incumbent* serta bekerjasama dengan caleg di level kabupaten.

Dilihat dari strategi yang diterapkannya, caleg tersebut menunjukkan dirinya merupakan seorang politisi kawakan. Ia memahami kondisi dapilnya dan bagaimana pemetaan untuk meraih suara di dapilnya sendiri.

Dalam hal mengedepankan pendekatan tokoh, masyarakat di dapil III yang merupakan masyarakat sub-urban dengan mayoritas masyarakat tani di pedesaan yang masih mengedepankan pola relasi patronase, masih mempercayai pengaruh dari ketokohan baik itu dari pemimpin pemerintahan maupun pemuka masyarakat dan pemuka agama. Dengan melakukan pendekatan tokoh ini, caleg secara minimal telah menabung popularitas kepada masyarakat di dapilnya. Pola pendekatan kepada tokoh-

tokoh masyarakat ini tidak hanya digunakan oleh Irwan Hayat sebagai salah satu caleg, melainkan oleh caleg lainnya di wilayah yang berbeda.

Pola pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat ini menegaskan bahwa struktur sosial dan sistem elit dalam masyarakat masih berlaku khususnya di wilayah masyarakat dengan pola sub-urban. Kemungkinan meraih suara dengan cara-cara pendekatan ketokohan akan sangat menguntungkan dan memudahkan caleg untuk berkampanye. Hal ini menunjukkan sekalipun masyarakat dianggap sudah menjadi pemilih rasional, pola-pola pemilih konvensional masih bisa ditemui di Indonesia dengan kategori wilayah pemilihan tertentu khususnya sub-urban.

Di beberapa wilayah sub-urban di Indonesia juga dikenal sebagai basis massa dari partai-partai tertentu khususnya partai yang sudah lama berdiri, yakni PDI, PPP, PKB dan Golkar. Di dapil 3 sendiri, Kab. Sumenep merupakan basis suara kuat untuk PKB karena mayoritas dapil 3 basis agama. Kepiawaian membaca basis massa partai bagi caleg merupakan kemampuan pemetaan yang cukup penting. Hal ini dibuktikan oleh dengan hanya memilih 3 wilayah strategis dalam dapilnya yang merupakan basis massa kuat dari PKB, yakni Ganding dan Guluk-guluk. Diakui oleh Irwan Hayat, hanya dengan

menguasai 2 wilayah tersebut, kemungkinan suara cukup untuk meloloskannya ke DPRD Kabupaten Sumenep. Prestasi yang membanggakan bagi Irwan Hayat, bahwa ia satu dari beberapa caleg yang langsung dinyatakan lolos secara murni ke DPRD dengan suara spesifik atas namanya alias bukan suara partai.

Menguasai wilayah tempat tinggalnya di Guluk-Guluk merupakan hal utama yang ia kejar, meskipun persaingan dengan PPP cukup sengit namun ia berhasil memenangkan perolehan suara untuk namanya di wilayah Guluk-Guluk. Sementara untuk wilayah Ganding merupakan basis tradisional PKB karena basis pesantren. Di wilayah ini, siapapun calegnya masyarakat dipastikan akan memilih PKB

Kemampuan pemetaan suara dan mengelola basis massa menjadi salah satu strategi yang cukup efektif untuk meraih suara, ditambah dengan kondisi bahwa basis merespon dengan baik kampanye dan sosialisasi yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa caleg tersebut sudah melakukan tahap *segmenting* dengan baik, dengan memahami dan mengidentifikasi kelompok masyarakat.

Kemampuan mengidentifikasi kelompok masyarakat ini ia terapkan juga dalam meraih simpati dan dukungan dari pemuda sebagai kelompok pemilih pemula

yang jumlahnya cukup signifikan, Irwan Hayat melakukan diskusi-diskusi kritis seputar kondisi sosial dan politik. Lain halnya dengan pemuda, yang irwan hayat lakukan adalah pendekatan dengan aktivitas-aktivitas kepemudaan seperti seni dan olahraga dengan memanfaatkan pengurus partai di tingkat desa sebagai agen pelaksana. Jadi yang ia lakukan benar-benar memperhatikan detail konfigurasi masyarakat pemilih di dapilnya dengan membedakan pendekatan kepada mahasiswa dan pemuda. Organisasi Alumni pesantren pun ia tempatkan juga sebagai Tim Sukses internal dan eksternalnya beberapa pengurus partai. Proporsi tim sukses selama kampanye kisaran 70% dengan loyalis dan 30% dengan simpatisan lainnya.

Personal branding yang dilakukan oleh irwan hayat cukup efektif dan memang dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama sejak pemilu 2004. Irwan Hayat ternyata sudah menabung suara sejak menjadi anggota DPRD periode sebelumnya dengan selalu mendatangi konstituennya saat reses anggota dewan yang biasanya digelar selama 3 kali dalam setahun. Melalui reses, ia mendatangi konstituennya langsung dan membagikan nomor telpon, sms dan bbm atau datang ke rumah. Di rumahnya pun, ia menerima pengaduan dan aspirasi masyarakat 2 kali

dalam sebulan untuk diminta memperjuangkan program kebijakan. Dengan cara seperti ini, ia dapat mengkalkulasi secara bersih perolehan suara yang diterimanya dengan cara tetap menjaga basis dukungan dan kesolidan tim yang ia miliki. Meskipun dalam beberapa kesempatan, ia menuturkan ada juga tim sukses yang membelot.

Dalam kampanye pemilu legislatif lalu, yang paling mudah adalah membuat paket calon dari mulai DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, kerjasama paket calon ia lakukan dengan caleg dari DPRD Kabupaten. Sistem kerjasama paket ini yang biasanya muncul praktik 'selingkuh' yang dilakukan oleh tim sukses. Irwan Hayat mengatakan bahwa ada tim sukses yang membelot ke caleg lain selain dirinya namun masih satu paket dengan caleg kabupaten, atau tim sukses dari caleg kabupaten lainnya mengajak kerjasama dengan timnya yang bukan satu paket. Jadi tim sukses bisa saja membelot tapi bukan membelot ke partai lain, melainkan hanya berpindah ke caleg lainnya.

Menurut penuturan ketua DPC PKB KH. Imam Hasyim, hal ini bisa jadi disebabkan oleh jumlah honor yang berbeda, sementara tim sukses yang berasal dari struktur partai merasa tidak masalah karena yang penting adalah membesarkan partai itu sendiri, sehingga

pengurus partai tidak merasa perlu untuk menjadi arbitur. Selain itu, sulit dirasa sulit bagi pengurus partai untuk menetapkan sanksi bagi caleg yang menyerobot wilayah caleg lainnya dengan alasan sistem pemilu proporsional terbuka mau tidak mau memang tingkat kompetisinya tinggi.

Dalam kewajibannya sebagai pengurus, partai hanya mempersiapkan bantuan atribut kampanye seperti bendera, kaos maupun kalender berlambang partai bagi para caleg. Selain itu mengatur jadwal kampanye partai di setiap daerah, yang artinya partai tidak menjadwalkan kampanye spesifik untuk caleg tertentu melainkan untuk semua caleg di PKB dalam satu wilayah dapil yang sama dengan alasan efektivitas waktu dan efisiensi dana. Hal lain yang disiapkan partai adalah saksi yang merupakan ujung tombak partai, sekalipun pendanaan saksi ada juga yang ditanggung lebih besar oleh caleg.

Menurut Imam Hasyim, pemilu tahun 2019 menjadi lebih sulit karena persaingan sudah terjadi antar caleg dalam satu partai. Upaya merebut suara dari basis massa partai lain menjadi tidak fokus.

Beberapa kesamaan pandangan baik dari caleg maupun pengurus partai, mengenai persaingan antar caleg dalam satu partai yakni penilaian terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang dirasa

kurang baik karena usaha meningkatkan suara partai menjadi lebih sulit akibat adanya persaingan antar caleg yang bisa berujung konflik. Keduanya memberikan saran bahwa sistem pemilu diubah menjadi seperti pada pemilu tahun 2009 dengan sistem proporsional tertutup.

Menarik bahwa di satu sisi, caleg berkeberatan dengan sistem suara terbanyak karena akan menghasilkan pertarungan internal partai. Alasan lain bahwa dengan sistem nomor urut, loyalitas kader partai lebih teruji, dimana hanya kader-kader yang dianggap loyal dan berkualitas oleh partai yang akan ditempatkan di nomor urut paling awal. Artinya ada ketidaksiapan dan keengganan caleg untuk bersaing secara terbuka dengan caleg lainnya yang bukan berasal dari kader loyal PKB dan menganggap idealnya pertandingan atau persaingan suara adalah persaingan eksternal dengan partai yang lain bukan dengan sesama internal partai.

Disisi lain, baik caleg maupun pengurus partai mengungkapkan bahwa meskipun terjadi persaingan sesama caleg satu partai yang penting adalah silaturahmi dengan pengurus partai dan kerjasama untuk tidak mengambil wilayah caleg lainnya. Hal ini dikatakan lebih baik karena semua caleg bergerak untuk meraih suara masyarakat dan sama-sama membesarkan suara partai. Bahkan

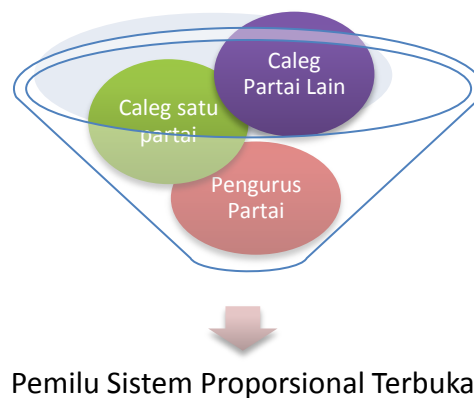
menurut penuturan Imam Hasyim, yang terpenting adalah mengedepankan poin-poin keunggulan PKB sebagai partai yang pro rakyat dan basis agama. Adanya perasaan tanggungjawab bersama untuk membesarkan suara partai menjadi salah satu alasan penting, utamanya bagi para pengurus DPC untuk bisa meraih suara signifikan di level kabupaten/kota.

Jadi dapat dilihat bahwa ada perbedaan cara pandang dan cara menyikapi persaingan antar caleg dalam satu partai yang sama. Khususnya dalam penelitian ini, PKB memang memiliki sistem kepanutan yang khas yang sangat struktural untuk membesarkan suara partainya terlepas dari siapa calegnya yang akan duduk di kursi parlemen. Hal ini terlihat dari cara berpikir tentang kemenangan partai baik yang diungkap oleh tim sukses maupun yang diungkap oleh caleg. Bagi mereka, doktrin utama adalah memenangkan suara PKB sebanyak-banyaknya dan semua elemen PKB turun tangan untuk meraih suara.

Sementara dalam cara pandang individu, hal ini justru bertentangan. Ada kecemburuan yang jelas yang dilontarkan oleh narasumber yang merasa sudah menjadi kader yang loyal terhadap partai, terbukti bahwa keterlibatannya dengan partai sudah aktif sejak tahun 2007. Sebagai individu, persaingan sistem suara terbanyak (proporsional terbuka)

mengecilkan peluang kader yang loyal untuk bisa lolos sebagai anggota dewan. Berbanding lurus dengan kondisi pemilih saat ini yang cenderung pragmatis dimana secara kultur masyarakat mengharapkan pemberian langsung dari caleg dan tantangan terberat bahwa caleg pun tidak bisa menyalahkan kondisi masyarakat yang sudah terlanjur pragmatis. Sehingga caleg dituntut untuk bekerja ekstra untuk

dapat meraih suara. Namun dalam hal ini, Irwan Hayat sebagai caleg *incumbent* memang memiliki keunggulan baik dari segi *personal branding* yang sudah ia ciptakan sejak lama maupun pengalaman yang mengajarnya kemampuan menganalisis dan mengolah pemetaan basis suara sehingga masih bisa mengungguli caleg lainnya.



Gambar. Relasi Aktor Intermediary dalam Pemilu

Korelasi Caleg setelah terpilihnya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Setelah proses pemilihan calon legislative (caleg) Kabupaten Sumenep periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan KPU Sumenep nomor 1468/HK.03.1-Kpt/3529/KPU-Kab/VII/2019, Anggota DPRD Sumenep 2019-2024 dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) adalah sebagai berikut (Madura, 2019):

Dapil I

1. Herman Dali Kusuma (PKB)
 2. Nurussalam (Gerindra)
 3. Nia Kurnia (PDI-P)
 4. Akis Jasuli (Nasdem)
 5. Wiwid Harto Yudanto (PKS)
 6. Mohammad Yusuf (PKS)
 7. H. Latib (PPP)
 8. Musahwi (PAN)
 9. Nur Aini (Demokrat)
- Dapil 2
1. Fadli Oktaviari (PKB)
 2. Jubriyanto (Gerindra)

3. Holik (Gerindra)
4. Dekky Purwanto (PDI-P)
5. H. Subaidi (PPP)
6. Faisal Muhlis (PAN)
7. Arfian Mukhlas (Demokrat)

Dapil 3

1. **Irwan Hayat (PKB)**
2. Ach. Naufil MS (PKB)
3. Ahmad Suwaifi Qayyum (Gerindra)
4. K. Ahmad Salim (PPP)
5. Siti Hosna (PAN)
6. M. Ramzi (Hanura)
7. Akhmas Jasuli (Demokrat)

Dapil 4

1. H. Abdul Hamid Alimunir (PKB)
2. Syaiful Hasan (Gerindra)
3. H. Zainal (PDI-P)
4. Rozah Ardhi Kautsar (Nasdem)
5. Kh. Syaiful Bahri (PPP)
6. Agus Rahman Budiharto (PAN)
7. Indra Wahyudi (Demokrat)

Dapil 5

1. M. Muhri (PKB)
2. Samioeddin (PKB)
3. Suroyo (Gerindra)
4. Umar (PDI-P)
5. Juhari (PPP)
6. Gunaifi Syarif Arroddy (PAN)
7. Melly Sufianti (Hanura)
8. H. Masdawi (Demokrat)

Dapil 6

1. Abu Hasan (PKB)
2. H. Dulsiam (PKB)
3. Musta'em (Nasdem)

4. M. Syukri (PPP)
5. Suhariono (PAN)
6. Mohammad Hanafi (Demokrat)
7. Badrul Aini (PBB)

Dapil 7

1. H. Risnawi (PKB)
2. Darul Hasyim Fath (PDI-P)
3. H. Mas'ud Ali (PPP)
4. Saefudin (Hanura)
5. Ahmad Zainurrahman (Demokrat)

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwasanya formasi kemenangan calon legislative periode 2019-2024 di Kabupaten Sumenep banyak di dominasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasilnya, PKB menjadi pemenang dengan memperoleh kursi terbanyak yakni 10 kursi, disusul PPP 7 kursi, Demokrat 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 6 kursi, dan PDI-P dengan 5 kursi. Kemudian Partai Hanura mendapatkan 3 kursi, Nasdem 3 kursi, PKS 2 kursi, dan PBB 1 kursi. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun calegnya akan dapat memenangkan pemilihan apabila berasal dari PKB karena PKB menjadi partai dominasi pilihan rakyat Kabupaten Sumenep

Partai politik merupakan sarana, alat atau wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dari sini partai politik dapat disebut political linkage yakni penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Banyak partai

politik yang berlomba-lomba mencari simpati masyarakat agar mendapat dukungan dari masyarakat, terlebih dalam proses pemilihan umum baik tingkat legislative maupun executive. Kondisi ini menjadikan partai sebagai Electoral linkage yakni partai memberi syarat calon-calon kandidat untuk berjanji, orientasinya untuk memenangkan pemilu dan keputusan berada ditangan elite partai (Lawson, 1988).

Proses demokrasi melalui pemilihan umum proporsional terbuka telah membuka cakrawala masyarakat untuk menjadi pemilih rasional. Pemilih rasional lebih cenderung untuk memilih kandidat berdasarkan visi, misi, maupun ideologi partai ketimbang kedekatan personal. Kampanye kotor seperti *money molitics* tidak lagi menjamin pemilih memberikan dukungannya.

Pemilihan umum tingkat legislative dengan prosedur pemilihan proporsional terbuka justru menggambarkan lahirnya *kader-kader instan* yang meningkatkan persaingan antar caleg sesama partai politik. Pemilihan rasional terbuka yang mengabaikan no urut caleg dalam satu dapil dan berdasar suara terbanyak menjadikan partai politik tidak hanya sebagai kendaraan caleg dalam pesta pemilihan umum saja. Namun lebih sebagai jembatan antar sesama caleg dengan membentuk sebuah system yang

kuat untuk meminimalisir kemungkinan persaingan yang kurang sehat antar calegnya. Persaingan tersebut secara eksplisit terlihat massif karena strategi-strategi kemenangan antar caleg terutama caleg kader (pengurus) partai dengan kader instan dapat dirasakan kurang sehat.

Fenomena munculnya kader-kader instan tidak menjadi problem besar bagi kader lama dalam bersaing meraih kepercayaan masyarakatnya dalam hal ini pemilih. Kader-kader instan terkadang seperti mem-by pass proses intensitas terhadap pemilihnya dengan mengasumsikan bahwa kedekatan dengan masyarakat dapat terjalin melalui partai yang memiliki basis massa kuat. Sayangnya pertimbangan ini tidak dipikirkan secara matang bagaimana proses membentuk kepercayaan yang telah dilakukan oleh kader-kader lama. Hal inilah yang menjadikan Irwan Hayat terpilih dalam pemilihan umum legislative periode 2019-2024.

Intesitasisasi yang dilakukan Irwan Hayat telah dibentuk sejak dia aktif bergabung menjadi anggota PKB meskipun tidak menutup kemungkinan politik patronase ikut serta memudahkan Irwan Hayat untuk terjun dalam kegiatan politik. Selama menjadi anggota partai hingga masuk dalam jajaran pengurus partai tingkat DPC Kabupaten Sumenep telah membuat Irwan Hayat memiliki

segudang pengalaman dan kedekatan emosional terhadap masyarakat. Sebagai anggota dan pengurus partai, Irwan Hayat sangat memahami perannya sebagai penghubung (linkage) antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga Irwan Hayat kerap menjadi mediator dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Namun belum bisa diketahui keberhasilan

kongkrit seperti apa yang telah dilakukan. Hingga menjadi anggota Dewan Irwan Hayat masih memperjuangkan kebutuhan masyarakat, seperti, menaikkan UMR, keadilan dibidang hukum dll. Sehingga bisa digambarkan proses peran linkage agar mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyarakat, yaitu ;



5. PENUTUP

Strategi merupakan senjata yang sangat penting dalam memperoleh kekuasaan politik. Keberhasilan Irwan Hayat ditentukan oleh strategi yang terencana dengan baik dan implementasi strategi tersebut secara konsekuen. Strategi politik yang dicanangkan pada saat kampanye oleh Irwan Hayat, antara lain :

1) Mengedepankan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat maupun pengurus partai dari mulai tingkat RT, RW, Kecamatan dan

tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

- 2) Memanfaatkan basis dukungan massa PKB di wilayah dapil khususnya di Ganding, guluk-guluk dan paragaan sebagai basis kuat tradisional PKB.
- 3) Memanfaatkan pemuda dan mahasiswa sebagai agen marketingnya karena beliau aktif di organisasi PMII
- 4) Mengedepankan prestasi dirinya sebagai caleg *incumbent* serta bekerjasama dengan caleg di level kabupaten.

Berbicara kampanye yang terpenting adalah pertama, bagaimana

person atau figur kita dikenal oleh konstituen, ini adalah sosial kapital yang sangat penting. Kedua, calon yang akan berkompetensi punya mesin partai yang baik, dan ketiga iklan atau kampanye yang dilakukan dengan baik *door to door* maupun kampanye masa dan keempat adalah program kerja yang lebih pro rakyat.. Strategi populis biasanya sangat menjanjikan segalanya, tanpa mempertimbangkan apakah janji-janji itu dapat diterima dan berkemungkinan untuk diwujudkan, karena sebagian besar pemilih kurang mengerti politik dan harapan akan masa depan yang lebih baik, senantiasa akan selalu memainkan peranan yang besar dalam pemilu, sang populis berada pada posisi yang strategis yang jelas sangat menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faishal, N. (2021, November). *Santri Milenial Pimpin Garda Bangsa Sumenep, Komitmen ke NU*.
<https://jatim.nu.or.id/parlemen/santri-milenial-pimpin-garda-bangsa-sumenep--komitmen-ke-nu-qduEV>
- Jamaluddin. (2022). *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Publica Indonesia Utama.
- Lawson. (1988). *When Linkage Fails*. Princeton University Press.
- Madura, M. (2019, July). *Daftar Anggota DPRD Sumenep Periode 2019-2024*.
<https://kumparan.com/mediamadura/daftar-anggota-dprd-sumenep-periode-2019-2024-1rWClkno9tc/full>

- Moleong, L. . (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- R Indrawan, P. Y. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. PT. Refika Aditama.
- Schroder, P. (2010). *Strategi Politik*. Friedrech-Naumman-Stiftung fur die Freiheit.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Tohirin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling*. Pt Raja Grafindo Persada.